

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com

Rabu
10 Januari 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Baubau Menuju Kota Blue Citizien Dengan Bidik Jadi Tuan Rumah Even Untuk Mendunia.

Diduga Terjadi Pungli, Pedagang di Pujaserata Stadion Betoambari Baubau Keluhkan Pembayaran Air dan Listrik Tanpa Kupon

Blue Citizen Priority's Activities

- 1. Blue Citizen Village/City Development (Blue Village/City)**
 - Actor/leader Exchange [People to People Connection];
 - Community college for learning and education;
 - Blue product development and promotion;
 - Blue Citizen Camp;
 - Capacity building by linking marine science with local/traditional knowledge;
 - Various Ocean Campaign Program
 - Blue Citizens Voluntary compliance Program
 - ..
- 2. Blue Citizen Youth Forum Development (Blue Youth Forum)**
 - Blue youth various sport activities (Junior and Youth Sailing, Blue Citizens fun run, etc)
 - Blue Lab and Youth Science
 - Blue Citizen Camp;
 - Youth and Student Exchange Program;
 - Blue Citizens Voluntary compliance Program
 - f. ..
- 3. Blue Citizen High Level Dialog (Blue Policy)**
 - Talk show
 - Think-Tank and Policy-Tank Forum
 - Policy Interview and Podcast
 - d. ..
- 4. Blue Citizen Week**
 - Blue Exhibition and Festival
 - Blue Citizen Art and Culture Performance
 - Blue Citizen Beach Actions
 - Games and Workshop
 - e. ..



Tandon dan sumur bor yang dibangun Dispora di Stadion Betoambari Baubau dimanfaatkan pedagang di Pujaserata

Pewarta: Alyakin

BAUBAU, BP-Diduga terjadi pemungutan liar (pungli) di pujaserata stadion Betoambari, tepatnya di Kelurahan Tanganapada Kecamatan Murhum Kota Baubau Provinsi Sulawesi Teng-

ara (Sultra). Pungli tersebut dilakukan mulai dari tahun 2022 sampai Desember 2023. Pasalnya, para pedagang membayar air dan listrik tidak diberikan karcis atau kupon.

Salah satu pedagang

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Letak strategis Baubau sebagai kota maritim yang menghubungkan jalur Barat dan Timur Indonesia, serta berhubungan langsung dengan posisi silang emas dunia di kawasan Asia Pasifik menjadi anugerah tersendiri untuk mengelolanya dari sektor tersebut dalam sebuah meta-ide yang disebut Kota Blue Citizen.

Apalagi Baubau saat dipimpin Wali Kota Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M.Si, seorang pakar di bidang kawasan pesisir dan juga Ketua Umum

Lanjutkan ke Hal: 7

Tingkatkan Indeks SPBE, Diskominfo Baubau Perketat Keamanan Aplikasi OPD

Lanjutkan ke Hal: 7

Perempuan Baubau Buktikan Kepekaan Pada Kondisi Sosial



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Ilmu itu tak boleh berhenti di dinding-dinding ruang belajar, tapi harus diimplementasikan di ruang-ruang interaksi sosial ilmu harus di uji, ditantang dan diperdebatkan dan perempuan sangat paham hal ini.Kemampuannya berinteraksi dan mengorganisir diri tidak diragukan lagi. Terlebih ketika sampai pada diskusi tentang kondisi sosial disekitar perempuan akan menunjukkan

Lanjutkan ke Hal: 7

PEOPLE

KEAMANAN SIBER ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA



SOCIAL ENGINEERING
Phishing
Pretexting
Baiting

CYBER HYGIENE
Malicious Site
Software Updates
Saring sebelum sharing
Penggantian Password
Backup Data



HUMAN DEVELOPMENT

SECURITY AWARENESS



Pewarta: Andina L

BAUBAU, BP-Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau

(Diskominfo) terus berupaya dalam memperketat keamanan aplikasi yang telah dibuat oleh masing-

masing OPD sehingga tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA

PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Baubau Menuju Kota Blue Citizen Dengan Bidik Jadi Tuan Rumah Even Untuk Mendunia

Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023-2028.

“Posisi Kota Baubau sebagai kota maritim di kawasan Asia Pasifik, juga kepakaran Bapak Wali Kota dan sebagai ketua Umum HAPPI, maka kota ini dipersiapkan sebagai Kota Blue Citizen,” kata H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si “Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, dalam rilisnya ke media, Minggu (7/1/2024).

Mengutip penjelasan Wali Kota Dr. Rasman, Andi Hamzah mengemukakan Blue Citizen itu adalah sebuah inisiatif yang diusulkan dalam komunitas APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), untuk membangun literasi masyarakat agar lebih memahami, membangun minat dan

kepedulian serta bisa memanfaatkan laut secara lebih bijak dan berkelanjutan.

“Target Bapak Wali Kota mendorong Baubau sebagai kota Blue Citizen, dan bisa mengambil peran sebagai tuan rumah Blue Citizen Week 2024. Ini langkah strategis dan jitu agar Baubau bisa lebih mendunia. Karenanya literasi masyarakat di sektor kelautan juga terus didorong agar bisa memanfaatkan dengan bijak dan berkelanjutan,” ujar Andi Hamzah mengutip arahan Wali Kota Baubau.

Secara teknis, Blue Citizen diusulkan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada saat ini untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan blue economy yang pada dasarnya disebabkan karena rencananya

literasi masyarakat terhadap laut. Hal ini juga secara umum senafas dengan Ocean Literacy Action dari UN Decade of Science (IOC).

“Namun Blue Citizen sebagai platform lebih dari sekedar gerakan literasi, dan Kota Baubau bisa mengambil peran strategis sebagai tuan rumah Blue Citizen Week 2024, siapkan dan pelajari lebih teknis,” pesan Wali Kota Dr. Rasman kepada segenap pejabatnya melalui grup media sosial Pemkot Baubau.

Dijelaskan Wali Kota, Baubau sekarang sedang mempersiapkan berbagai hal untuk ikut berperan aktif menyikapi peluang kerjasama RI-RRT, langkah yang Pemkot akan lakukan adalah mengidentifikasi berbagai program yang akan diusulkan masuk dalam aktivitas Blue Citizen Joint

Action. Dalam waktu dekat Pemkot akan menyiapkan proposal yang akan dibicarakan dengan KKP bersama PIC Indonesia.

Berdasarkan outcome Blue Citizen workshop pada bulan september, RI-RRT sepakat untuk memulai dengan pilot project yang dinamakan Blue Citizen Joint Action. Kesepakatan ini telah dicanangkan bersama (co-release) pada bulan November di acara Xiamen Ocean Week.

Kesepakatan ini menurut Wali Kota menjadi pijakan awal dan OPD lingkup Pemerintah Kota Baubau secepatnya mengambil langkah, dengan mempelajari dan menuangkannya dalam langkah cepat, agar Baubau berperan strategis di Blue Citizen ini. “Setidaknya sebagai tuan rumah event Blue Citizen Week 2024,” ujarnya. (*)

Diduga Terjadi Pungli, Pedagang di Pujaserata Stadion Betoambari Baubau Keluhkan Pembayaran Air dan Listrik Tanpa Kupon

Hajifa di temui Baubau post mengungkapkan, pihaknya membayar retribusi air sebesar Rp 4 ribu setiap harinya. Sementara listrik di bayar berdasarkan jumlah lampu, satu lampu di hitung Rp 1.000

“Yang datang menagih, pembayaran air, listrik, sampah dan sewa tempat berbeda orangnya. Yang pakai kupon (karcis-Red) hanya sewa tempat dan sampah. Kalau pembayaran sampah itu sama pegawai dinas kebersihan, kalau sewa lapak, kita bayar di pegawai Bappeda itu ada kuponnya, bayar setiap bulan sebesar Rp 45.000. Kalau Air dan listrik kita bayar tidak diberikan kupon,” katanya.

Pembayaran air dilakukan sejak tahun 2022 sampai Desember 2023, setelah pembangunan sumur bor oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Tak hanya itu, para pedagang telah

membeli pipa untuk menyambungkan ke tandon yang sumber airnya dari sumur bor. Para pedagang membayar antara Rp 2 ribu sampai Rp 4 ribu

Di samping itu, pihaknya mengakui bahwa pegawai dari Dinas pemuda dan olahraga (Dispora) Kota Baubau telah memutuskan sambungan air dari tandon selama satu minggu. Pemutusan dilakukan pada Desember 2023.

“Hampir satu minggu air putus, tapi sekarang sudah disambung kembali, karena kita membutuhkan air untuk menjual, kita diminta bertanda tangan di atas materai, bahwa tidak keberatan untuk membayar air sebesar Rp 5 ribu untuk pembelian pulsa listrik,” katanya, Rabu (21/12/2023).

Penelusuran media ini, Badan Pendapatan Aset Daerah (Bappeda), Bidang aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) serta sekretariat daerah tidak memungut retribusi air dan listrik.

Kadis Pemuda dan Olahraga, Dr Moh Tasdik dikonfirmasi belum lama ini mengatakan, pihaknya tidak mengetahui bahwa sumur bor yang dibangun Dispora telah dimanfaatkan oleh para pedagang di pujaserata stadion Betoambari.

“Saya tidak tau persis, tapi saya jujur tidak tau ada itu (Sumur bor yang pakai oleh pedagang-Red), orang-orang (Pedagang) itu biasanya ambil air di mesjid,” katanya.

Disisi lain, pembangunan sumur bor oleh Dispora Baubau dipertanyakan untuk WC dan penyiraman halaman atau lapangan bila terdapat kegiatan di stadion Betoambari.

“Itu sebetulnya mengantisipasi, disitu ada WC untuk para atlet, sekaligus melakukan penyiraman lapangan stadion Betoambari,” ucapnya. (*)

Perempuan Baubau Buktikan Kepekaan Pada Kondisi Sosial

kepedulian dan bergerak secara alami untuk merespon.

Ada kutipan dari salah seorang Bapak Bangsa, Mohammad Hatta, bahwa ilmu itu tidak hanya berguna untuk menemukan kebenaran, tetapi juga bermanfaat untuk memahami berbagai masalah daerah dan bangsa. Dan apa yang telah diinisiasi dan dikerjakan oleh seluruh Organisasi Wanita di Kota Baubau saat ini adalah implementasi dan perempuan dengan ilmu dan kepekaannya terhadap kondisi sosial yang ada, termasuk kepekaan dan kontribusi dalam menjawab tantangan Kota Baubau seperti Percepatan Penurunan Stunting Pengendalian Inflasi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

Hal ini diungkapkan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-95 dan HUT Dharma Wanita ke-24 di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata Sabtu (23/12/2023).

“Saya tadi membayangkan bagaimana kondisi seorang Ibu yang sudah berusia 95 tahun, tapi tidak perlu khawatir masih kaum

Wanita yang berusia 24 tahun,” kelakar Dr Muh Rasman Manafi menganalogikan PHI ke-95 dan HUT Dharma Wanita ke-24.

Namun demikian menurut Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman, juga patut untuk mengingatkan diri bahwa sangatlah penting perempuan dan laki-laki melakukan refleksi bersama. Masih banyak stigma, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tingginya kasus perceraian dan anak berhadapan dengan hukum, menjadi sebuah penanda, bahwa isu ketahanan keluarga menjadi sebuah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian lebih dan kerja sama dan semua. Perempuan dan laki-laki suami dan istri harus saling menghormati dan menghargai memahami tugas dan perannya masing-masing dan berusaha menyeimbangkannya dengan membangun komunikasi yang lebih efektif, tidak saling menyalahkan tapi terus saling menguatkan.

Mengapa? Karena ujung dari perjalanan bersama dan rumah tangga adalah bagaimana anak-anak mampu diantarkan menuju

sukses dan tumbuh menjadi generasi yang tangguh secara fisik, mental, emosi dan spirituilnya. Generasi yang mampu menjawab tantangan di 100 tahun Indonesia Merdeka nanti. Generasi Emas, yang akan mengantarkan Indonesia memanen Bonus Demografi atau Bencana Demografi. Dan ini bukanlah tugas yang mudah.

Dikatakan, sebagai kelompok masyarakat yang secara demografi Jumlah penduduknya tidak sedikit dan bersamaan dengan periode politik persiapan Pemilu 2024, perempuan tentu memiliki kesempatan bukan hanya untuk memilih, tetapi lebih dari itu, ikut menentukan nasib diri, keluarga dan bangsanya. Hal ini tentu saja akan menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan wawasan, kesadaran, dan sikap positif perempuan Indonesia tentang peran strategisnya Perempuan dan politik tidak dapat dipisahkan. Melalui politik, perempuan diharapkan mampu menghadapi berbagai hambatan, termasuk diskriminasi gender ketidaksetaraan, kekerasan, serta ketidakmampuan untuk

mengekspresikan gagasan dan aspirasi perempuan.

“Perempuan Bersuara menjadi sangat relevan dan penting untuk digelorkan dalam Peringatan Hari Ibu ke-95. Ini adalah panggilan untuk memberdayakan perempuan memberi kesempatan untuk berbicara tentang isu-isu yang penting bagi mereka, dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan diberikan perhatian pantas serta menggemakan bahwa tidak seorangpun ditinggalkan. Ini juga merupakan langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender dan inklusi sosial dimana perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan orang miskin menjadi kelompok yang selama ini termarginalkan, suaranya harus didengarkan dan kebutuhannya harus dipenuhi, sesuai dengan cita-cita global Sustainable Development Goal (SDG’s) yaitu: “no one left behind”.

Di penghujung acara, Pj Wali Kota bersama Ibu Ketua TP PKK Kota Baubau menyempatkan diri duet membawakan sebuah lagu dengan mesra dan disambut hadirin dengan meriah. (*)

tahun 2018. Aspek keamanan ini mencakup kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya/aplikasi. Permasalahan yang

dihadapi Diskominfo saat ini adalah tidak adanya koordinasi dalam hal pembuatan aplikasi/web yang saat ini tersebar pada masing-masing OPD sehingga aplikasi/web dibangun asal-asalan serta tidak memperhatikan aspek keamanan. Aplikasi/web yang dibangun juga menggunakan server sendiri-sendiri yang mengakibatkan sulitnya menjaga keamanan aplikasi dan membengkaknya anggaran TIK untuk penyediaan server dimasing-masing OPD karena tidak terpusat di Diskominfo.

Pengendalian keamanan yang bersifat preventif sangat penting untuk meminimalisasi kerentanan (vulnerability) dan meningkatkan level ketahanan dari aplikasi yang dimiliki oleh instansi terhadap

ancaman serangan. Setiap lubang keamanan (security holes) pada aplikasi beserta infrastruktur pendukungnya sangat berpotensi untuk masuknya ancaman yang akan menyerang aplikasi. Ancaman serangan akan selalu mencari titik kerentanan yang paling lemah, oleh karena itu harus ada persyaratan minimum dalam pengendalian preventif pengamanan aplikasi.

Beberapa tindakan preventif yang telah dilakukan oleh Diskominfo saat ini adalah dengan memasang 2 lapis sistem pengamanan untuk mencegah ter-

jadinya insiden siber pada aplikasi/web dan infrastruktur pemkot Baubau serta melakukan pengujian kerentanan aplikasi melalui kegiatan vulnerability assessment.

H Andi Hamzah Machmud berharap agar aplikasi yang sudah dibuat oleh seluruh OPD dibuatkan regulasi khusus dalam bentuk Perwali sebab nantinya Diskominfo akan melakukan evaluasi pemeriksaan sejauh mana OPD melakukan pemeliharaan aplikasi yang ada di OPD nya. Kenyataan yang ditemukan saat ini adalah OPD tidak melakukan update dan upgrade terhadap aplikasi/web yang telah dibuat dan terkesan dibiarkan begitu saja sementara kita mengetahui bahwa aplikasi/web merupakan sesuatu yang dinamis, selalu berkembang mengikuti pesatnya perkembangan dunia TIK yang berubah setiap detiknya. Pun halnya aktor kejahatan siber diluar sana selalu mengembangkan kompetensinya dan selalu berupaya menjebol pertahanan yang telah dibuat oleh suatu instansi.

No system is perfect, every system needs update.

Olehnya itu, Diskominfo membutuhkan peran dan dukungan dari OPD untuk sama-sama menjaga keamanan aplikasi/web yang dibuat dengan melakukan update dan upgrade yang dibutuhkan.

Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kota Baubau melalui Diskominfo menjadi salah satu dari 32 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang bertujuan untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.

Hal ini juga diharapkan dapat mendukung peningkatan penilaian indeks SPBE Kota Baubau pada tahun 2024, sebab pada tahun 2023 nilai untuk Kota Baubau sangat kurang (1,38 dari skala 5). Indeks SPBE tidak hanya berpusat pada kegiatan di Diskominfo saja tetapi mencakup seluruh kegiatan pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan oleh seluruh leading sector pemerintah Kota Baubau.

“Berkaitan semua itu, tentu untuk mencapai ini semua seluruh OPD dituntut senantiasa dapat bekerja bersama sebagaimana tagline Pj. Wali Kota Baubau, Dr. Muh. Rasman Manafi, SP, M.Si bahwa harus selalu bekerja bersama dalam menyelesaikan seluruh persoalan di Kota Baubau dan kita semua tidak akan mampu menyelesaikan persoalan satu persatu meskipun diakui punya tupoksi masing-masing tapi semuanya saling berkaitan,” tutupnya. (*)

Tingkatkan Indeks SPBE, Diskominfo Baubau Perketat Keamanan Aplikasi OPD

gung jawab.

Demikian dikatakan Kadis Kominfo Kota Baubau, H Andi Hamzah Machmud, S.Sos., M.Si Minggu (7/1/2024).

Menurut H Andi

Hamzah Machmud, OPD harus dapat memahami kondisi dimana Diskominfo mempunyai tanggung jawab untuk menjamin keamanan sumber

daya TIK baik berupa aplikasi/web maupun infrastruktur pendukung SPBE. Hal ini sesuai dengan amanat Presiden RI dalam Perpres SPBE no. 95

Permasalahan yang

Kasat Pol PP Baubau: APK Caleg Melanggar Aturan Perda dan SK KPU Nomor 108/2023 Segera Ditertibkan



Kasat Sat Pol PP, Muhammad Takdir.

Pewartanya: Alyakin

BAUBAU, BP - Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melalui Desk pemilu gelar rapat koordinasi bersama Bawaslu Baubau, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) di aula kantor Wali Kota Baubau, Jumat (05/01/2024).

Demikian diungkapkan Kepala Sat Pol PP, La Ode Muhammad Takdir ketika ditemui Baubau post di ruang kerjanya, Senin (08/01/2024). Kata dia, dalam rapat disepakati delapan poin, salah satunya tentang penertiban APK yang diduga melanggar peraturan daerah (perda) dan Surat Keputusan (SK) KPU nomor 198 tahun 2023.

"Jadwal penertiban APK ditentukan oleh desk pemilu yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Jadi kami di Sat Pol PP tinggal menunggu sebab jadwal, teknis penertiban APK sama Kesbangpol," kata Kasat Sat Pol PP,

Muhammad Takdir.

Sebelum menertibkan APK para kontestan yang diduga pemasangannya melanggar aturan, mereka akan membentuk tim. Kemudian, baliho yang tertibkan diangkat kendaraan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Baubau dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baubau. Rencananya, baliho akan di amankan di Kantor sat Pol PP.

"Strategi kedua dalam rangka penertiban APK, apakah nanti dibentuk satu tim di Sat Pol PP, ataukah nanti di bentuk di setiap kecamatan, artinya tim di setiap kecamatan bekerja secara mandiri, anggota Sat Pol PP didampingi Panwaslu, PPK dari KPU, Polisi/TNI, Lurah dan RT/RW," katanya.

Menurutnya, menjamurnya APK di sudut kota Baubau sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, bahkan sejumlah APK mengganggu arus lalu lintas karena mengganggu sudut pandang pengendara dan

itu sangat membahayakan.

"Jadi kami dari Sat Pol PP siap menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar peraturan daerah (Perda) maupun SK KPU nomor 198 tahun 2023 tentang lokasi pemasangan APK," katanya.

Olehnya itu, pihaknya berharap jadwal penertiban agar secepatnya ditentukan oleh tim desk pemilu (Kesbangpol-Red) sebab menjamurnya APK di sudut Kota Baubau akan membahayakan masyarakat.

"Sebaiknya agar disegerakan penertiban APK, Jangan menunggu lama lama ini, karena sudah sangat memprihatikan dan membahayakan pengendara di jalan raya." tutup.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Baubau belum dapat dikonfirmasi, pasalnya, ia tidak berada di Kantor atau berada di luar daerah.

"Beliau lagi tidak ada di kantor, sedang keluar daerah," kata pegawai Kesbangpol. (*)

Kepala Desa Bantu Pemenangan Capres-Cawapres Bisa Dihukum Penjara

Laporan: Hasim

Jakarta, -- Kepala desa yang sengaja menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu dan Pilpres 2024 bisa diberi hukuman pidana selama satu tahun penjara dan denda Rp12 juta.

Aturan tersebut

tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Pasal 490.

"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu

dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta," bunyi pasal 490 UU Pemilu.

Polda Jateng Buka Suara Soal Penyidikan Kades Terkait Dugaan Korupsi UU Pemilu juga

Bawaslu dan Pemkot Baubau Tak Toleransi APK Caleg Melanggar



Pewartanya: Alyakin

BAUBAU, BP-Bawaslu Kota Baubau dalam waktu dekat akan mengambil tindakan tegas menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dinilai melanggar ketentuan dan tidak akan memberikan toleransi. Pasalnya, sebelum melakukan penertiban, Bawaslu juga sudah menyurati, menghimbau Parpol sejak jauh-jauh hari.

Bahkan, beberapa kali Bawaslu dan KPU mengundang untuk melakukan kesepakatan bersama untuk penertiban APK secara mandiri. Hanya saja, apa yang dilakukan oleh Bawaslu tak digubris, sehingga diputuskan tindakan.

Demikian dikatakan Komisioner Bawaslu Kota Baubau Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Muh. Syahrani ketika ditemui di ruang kerjanya

Senin (8/1/2024). Menurut Syahrani, untuk rencana penertiban APK ini, Bawaslu Baubau sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan sudah meminta waktu hari Senin (8/1/2024) agar secepatnya agar dilakukan penertiban APK. Akan tetapi, berhubung Satpol PP masih ada agenda lain terkait masalah apel awal tahun maka mereka meminta waktu di hari Selasa (9/1/2024) atau Rabu (10/1/2024).

Kemudian, sebel-

umnya ada undangan rapat koordinasi pada Jumat (5/1/2024) dari Pemkot Baubau terkait masalah penertiban APK juga. Dan ketua Bawaslu Sarmin S.Pd sudah menyampaikan beberapa hal yang menjadi isi dari rapat tersebut disepakati bahwa jadwal penertiban akan dijadwalkan oleh Pemkot Baubau dan akan melibatkan para camat di tiap Kecamatan.

Dikatakan, untuk titik awal penertiban berdasarkan ha-

sil rapat, penertiban APK akan terfokus pada taman kota, di tempat tempat yang dilarang seperti tiang listrik, pepohonan, yang mengganggu ketertiban serta jalan-jalan protokol.

"Karena banyaknya baliho yang melanggar ini dan sudah didokumentasikan, Kita sudah inventaris, kita sudah ambil datanya, menggerakkan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Panwascam untuk mengidentifikasi dan mendata itu semua lengkap dengan dokumennya kita serahkan ke KPU dan SatpolPP dalam bentuk buku untuk melihat bukti-bukti yang sudah melanggar," tegasnya. (*)



Ilustrasi

mengatur tentang sikap yang harus diambil oleh kepala maupun aparat desa jelang Pemilu 2024.

Kepala desa, perangkat desa hingga anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Hal ini diatur dalam Pasal 280 Ayat (3). Kemudian, UU Pe-

milu mengatur kepala desa dilarang diikutsertakan sebagai pelaksana atau tim kampanye dalam Pemilu 2024 mendatang. Hal ini diatur dalam Pasal 280 Ayat (2).

Bila dilanggar, maka masuk dalam tindakan pidana pemilu sehingga bisa dikenakan sanksi tegas.

"Pelaksana dan/

atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan: (h) kepala desa, (i) perangkat desa, (j) anggota badan permusyawaratan desa," bunyi Pasal 280 ayat 2 UU Pemilu.

Selain dalam UU Pemilu, larangan kepala desa terlibat kampanye Pemilu juga dituangkan dalam UU Desa No-

mor 6 Tahun 2014. UU Desa pun melarang kepala desa menjabat sebagai pengurus parpol.

"Kepala desa dilarang menjadi (g) pengurus partai politik, (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah," Bunyi poin (g) dan (j) Pasal 29 UU Desa. (*)

Pj Gubernur Sultra ABR Pimpin Apel Gabungan Diawal Tahun 2024



Pewarta: Mashuri

SULTRA, BP-Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, memimpin apel gabungan ASN Lingkup Pemprov. Sultra, diawal tahun 2024 yang bertempat di halaman Kantor Gubernur Sultra, (Selasa, 02 Januari 2024)

Hadir dalam apel pagi yakni Asisten Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Sultra, Para Kepala OPD Lingkup Pemprov, Para Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang Lingkup Pemprov.Sultra, Pejabat Fungsional dan seluruh staf Pemprov. Sultra

Pj. Gubernur Sultra menyampaikan dua hal yang mendasar yakni sebagai instruksi awal apel ini, sebetulnya adalah wujud terimakasih kepada Allah SWT karna kita masih diberi kesehatan dan kedua disamping terimakasih kita, ketika kita bergerak untuk melaksanakan apel pagi ini, agar dapat memberikan informasi yang tentunya nanti dipake oleh ASN di dalam melaksanakan tugas.

Adapun dua hal yang disampaikan yakni Pertama pemakaian dalam menyikapi tahun baru 2024, pada saat menjelang tahun baru, kita melak-

sanakan doa di Mesjid Al-Kautsar serta magrib berjamaah, zikir, sholat Isya dan sholat hajat, kita memohon berbagai kebaikan bagi keluarga kita, Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Sultra.

Selain itu, Makna tahun baru sebetulnya yang setiap hari, Minggu, bulan dan setiap tahun adalah kesempatan baru kita untuk berbuat lebih baik, jadi bukan hanya terjebak di tahun baru saja.

“Sebenarnya setiap hari, Minggu, bulan dan setiap tahun adalah kesempatan baru kita untuk menjadi lebih baik lagi, jadi versi yang lebih baik dari sebelumnya, intinya seperti itu “ungkapnya

Lebih lanjut disampaikan, tentu untuk fokus kepada tujuan organisasi kita, dalam hal ini tujuan pemerintah Provinsi Sultra yang dijabarkan di masing-masing perangkat daerah, apa tujuannya dibulan Januari, February sampai dengan nanti akhir tahun 2024, jadi kita fokus disana.

Kemudian didalam menyikapi perkembangan tugas, ada berbagai dinamika yang membuat kita berubah.

“Pj. Gubernur berharap kepada ASN harus Fleksibel, adaptif dalam menyikapi semua itu, dilihat secara konteks sistem sectional

tidak harus kaku, tetapi fokus yang menjadi tugas utama kita”. Jelasnya

Selanjutnya, harapan saya selaku Pj Gubernur di tahun 2024 ini, kita saling berkerjasama dengan baik, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mendukung, saling mengintrospeksi diri masing-masing dan saling melengkapi, apabila ada sesuatu hal di kritisi saja.

Kedua mengimplementasikan pada resolusi tahun 2024. Resolusi sebagai organisasi dinamis, modern dan terkini, kita harus menetapkan resolusi, dipajang di masing-masing ruang kantor, harus semakin berakhlak, bekerja cepat, tepat dan hasilnya akuntabel.

Kemudian didalam Tagline core values ASN “BerAKHLAK” yang diluncurkan bapak Presiden RI pada saat HUT Kemenkumham pada tanggal 27, tahun 2021.

Pj. Gubernur mengingatkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK yakni:

Pertama, berorientasi pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.

Kedua, akuntabel yakni; melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,

cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Ketiga kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Keempat, harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

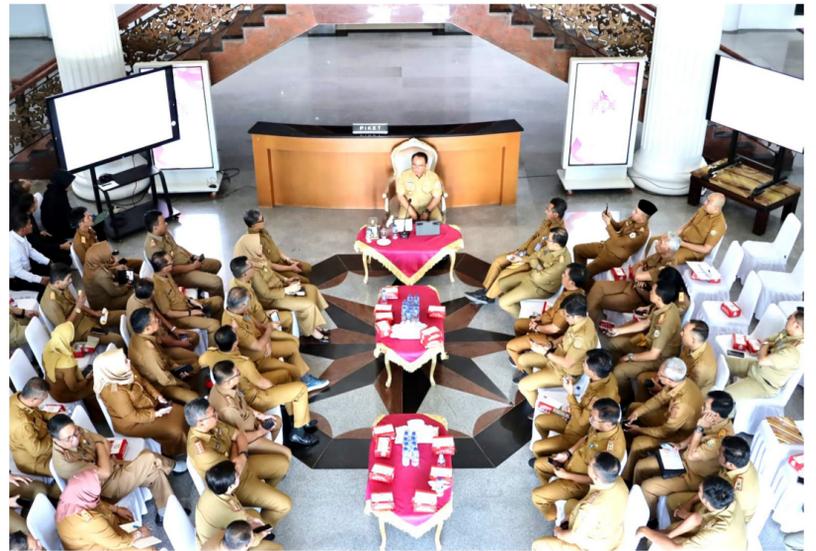
Kelima, loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Keenam, adaptif cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.

Ketujuh kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi,

terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. (*)

In Arahkan Pj Gubernur Sultra ABR kepada Kepala OPD Memasuki Tahun 2024



Pewarta: Lisna

SULTRA, BP-Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, memberikan arahan kepada Para Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di hari pertama masuk kantor di tahun 2024 bertempat di Lobby Utama Kantor Gubernur Sultra, (Selasa, 02 Januari 2024)

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 1 Setda Sultra, Asisten 2 Setda Sultra, Para Kepala OPD Lingkup Pemprov, Pepabri, Mahasiswa, Organisasi Masyarakat dan Pejabat terkait

Pj. Gubernur Sultra, mengucapkan selamat tahun baru 2024 dalam arahnya menyampaikan bahwa pertama tugas bagi teman-teman sekalian, bikin kinerja berbasis anggaran terdiri dari berapa target kinerja tahun 2024 kepada masing-masing kepala perangkat daerah, Rencana Penarikan Dana (RPD), sehingga targetnya standar nasional 95%

Kemudian, kalau pemeriksaan BPK atau WTP Wajah Tambah Pengecualian, ada juga target yang lain, kalau kita sudah tertib kedepannya akan semakin tertib, kedua bikin kalender kerja sesuai dengan perangkat daerah terdiri kegiatan dan pelaksanaan, sehingga teman-teman sekalian dikasih kewenangan, amanah, kepercayaan harus di jaga

semua itu, perlu dilihat peta jalan dalam kinerja berbasis anggaran “Money Follow The Program”, sehingga uang itu mengikuti programnya

Dari sana bagian-bagian, dibikin di masing-masing bidang/Kepala Bagian (Kabag) atau Karonya dibikin semuanya, jadi diselesaikan. Setelah ini, dikumpulkan sekarang dan bikin, saya kasih waktu 2 hari, paling lambat 3 hari, kalau bisa sehari lebih bagus dikumpulkan menjadi satu, sehingga teman bisa tau disana

“saya minta bikin, pelaksanaan dukungan anggaran, sehingga organisasi itu hidup di

masing-masing Kepala OPD melaporkan ke saya atau sekda” Ucap Pj. Gubernur Sultra

Lanjut, jumlah pejabat yang sebenarnya tersertifikasi, sehingga harus ditanya bendahara kita, apakah sudah punya sertifikasi atau tidak dan selalu dinamis sehingga harus berkembang disana, perlu dibaca kembali telaan tugas seperti, sehingga perlu diinformasikan sebagai organisasi yang modern itu terbuka atau dinamis

Dalam Resolusi 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, semakin berakhlak dengan cepat, tepar, ikhlas dan hasil akuntabel

Lanjut, ada 8 (delapan) arahan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yaitu: 1) Pengurangan Ke-

miskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Selain itu, dalam konsep kerjanya sama yaitu Kebijakan, Strategis, Implementasi (KSI), sehingga dalam kebijakan itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat di dalam perencanaan pembangunan jangka panjangnya, masih mempergunakan RPJPN 2025 sehingga pembangunan rencananya 20 tahunan, nanti tahun depan 2025 diganti lagi RPJMN

Ada prioritas nasional, RKP tahun 2024 ada Perpresnya, sehingga kita rencanakan kerjaan itu, mewujudkan Pemprov. Sultra yang semakin berakhlak dengan bekerja cepat, tepar, ikhlas dan hasil akuntabel

Perlu menyikapi H-43 hari pemilu dan pemilihan tahun 2024, serta siapkan rencana dan langkah-langkah kontijensi hadapi anomali musim, sehingga siap hadapi berbagai kedaruratan, dilanjutkan dengan mendengar audiensi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas). Tutupnya. (*)

Pj Bupati Buton Tengah Pimpin Apel Peringatan Hari Amal Bhakti Kementerian Agama ke-78



Laporan: Ardi

BUTENG, BP-Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf menghadiri sekaligus menjadi pemimpin Apel peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI Ke-78, di halaman Madrasah Aliyah Negeri I Buton Tengah, Rabu (3/1/2024).

Sebagai pemimpin Apel peringatan HAB, Pj Bupati Andi Muhammad Yusuf membacakan amanat dari Menteri Agama RI tentang pelayanan kepada umat beragama dan semangat pengabdian kepada

negara, bangsa dan agama.

"Pada momen HAB ke 78, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian agama untuk meningkatkan spirit layanan kepada seluruh umat beragama", ungkapnya.

Indonesia hebat bersama umat adalah tema yang diusung pada pada HAB ke 78 ini. Yang bermakna, bahwa kita harus bersama umat untuk menuju Indonesia hebat dengan memberikan layanan sebaik baiknya kepada seluruh umat beragama.

Pada tahun 2024 ini, kita dihadapkan pada peristiwa politik, yakni pemilihan umum. Bagi ASN Kementerian agama, jagalah netralitas sesuai den-

gan ketentuan perundangan.

"Saya meminta kepada ASN kementerian agama, untuk membantu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Mari kita kawal pemilihan umum dari potensi penggunaan politik identitas, terutama identitas keagamaan. Jadikan pemilihan umum sebagai agenda yang penuh gem-bira dan suka

Pemindahan Pedagang Pasar kaloko ke Pasar Sore Ompu Ditunda



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pemkab Buton menunda pemindahan para pedagang Pasar kaloko, Kelurahan Takimpo, Pasarwajo ke Pasar Sore Ompu, Kelurahan Holimombo, Kecamatan Pasarwajo ditunda.

Hal itu dikatakan Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi ketika memimpin pertemuan para pelaku usaha Pasar Kaloko di Aula Kantor Bupati Buton, Senin, 8 Desember 2023

"Kita akan menunda pemindahan para pedagang ke Pasar Sore Ompu.

Pemerintah kabupaten Buton bakal akan melengkapi fasilitas pasar Ompu sebelum para pedagang dipindahkan," kata Pj. Bupati Buton.

Penundaan itu setelah mendengarkan keluhan para pelaku usaha Pasar Kaloko yang mengeluhkan minimnya fasilitas seperti Toilet, sarana air bersih, drainase termasuk keamanan pasar.

Penundaan dan pemenuhan fasilitas pasar Ompu itu, disambut antusias para pelaku usaha.

Turut Hadir pada pertemuan itu, Ketua DPRD Kabupaten Buton, Sekda Buton,

Unsur Perwakilan Forkopimda, Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton, Kabag Setda Buton, Camat Pasarwajo, Lurah Takimpo, Lurah Holimombo, parabola Takimpo, Parabela Holimombo dan para Pelaku usaha.

"Pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat." "Pemerintah menginginkan rakyatnya itu untuk tidak sengsara dan akan berusaha memberikan yang terbaik kepada Masyarakat," katanya. (*)

Sekda Pimpin TPID Buton ikut Rakor Via Zoom dengan Pemerintah Pusat



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin mewakili Pj. Bupati Buton mengikuti Rakor Rakor TPID via zoom dengan pemerintah pusat di Anjungan Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Buton, Takawa, 3 Desember 2023.

Rakor TPID ini juga melibatkan unsur Forkopimda Kabupaten Buton, Kepala BPS Kabupaten Buton.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi minggu pertama bulan Januari tahun 2024 ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D. Dalam kesempatan itu, Mendagri mengatakan ber-

dasarkan survey ada dua isu utama di masyarakat, yaitu lapangan pekerjaan dan masalah stabilitasi bahan pangan. Gejala-gejala yang lain di berbagai negara juga dipicu masalah pangan, sehingga hal ini menimbulkan gejala keamanan dan politik.

"Jangan bosan dalam penanganan inflasi karena ini menyangkut stabilitasi bahan pangan," kata Tito.

Ia juga menjelaskan, perkembangan inflasi global, Indonesia menduduki posisi ke 53 dari 186 negara didunia, peringkat ke-7 dari 24 Negara G20, dan peringkat ke-4 dari 11 Negara ASEAN.

"Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS, maka tingkat inflasi bulan

kebulan (Desember 2023 terhadap November 2023) sebesar 0,41%, sedangkan inflasi tahun ke tahun dan inflasi tahun kalender (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,61%," jelas Mendagri Tito Karnavian.

Maka dapat disimpulkan, tingkat Inflasi Bulanan Desember 2023 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan tekanan inflasi tahunan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Usai Rakor TPID Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi di hadapan TPID Buton mengungkapkan strategi yang dilakukan tim TPID Kabupaten Buton dalam menekan inflasi yaitu dengan pemantauan (sidak)

ketersediaan stok dan pergerakan kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar dan distributor yang ada di Kabupaten Buton terutama di Pasar Kaloko dan Pasar Sabo, yang ada di kecamatan Pasarwajo, Ibu kota Kabupaten Buton.

Selain itu, TPID juga berkoordinasi dengan stakeholder untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui operasi pasar atau pasar murah.

TPID Kabupaten Buton bakal menanganakan menanam bersama di setiap hari Jum'at dan memanfaatkan pekarangan atau lahan kosong yang ada di kompleks perkantoran Takawa terutama menanam cabe yang saat ini mempengaruhi angka inflasi. (*)

Sambut Tahun Baru 2024 Pemkab Buton Gelar Istigosah dan Doa Bersama

Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton (Pemkab Buton) menggelar Istigosah dan Doa bersama menyambut tahun baru 2024. Istigosah dan Doa bersama itu menghadirkan Ustaz Muhammad Hamdani, Shi, di Masjid Nurul Yaqin Pasarwajo, Minggu 31 Desember 2023.

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi bersama Ketua TP PKK Kabupaten Buton, Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari, Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin bersama Ketua DWP Kabupaten Buton, Ny Kiki Amalia Asnawi, Dandim 1413 Buton, Dandim 1413/Buton, Letkol Inf. Ketut Janji SH, Kajari Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan, S.H., M.H, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Kemenag, Kabag,

Camat serta Masyarakat Kabupaten Buton turut hadir dan mendengarkan tausiah sera turut berdoa bersama.

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi dalam arahannya menyampaikan manusia tidak ada yg lebih sempurna, selalu hilaf dan salah. Untuk itu Kepala daerah di Bumi Penghasil Aspal Alam terbesa di dunia itu menggajak untuk selalu mawas diri. Mari kita tau diri akan kesalahan kita," kata Pj. Bupati Buton.

Sekwan DPRD Sultra ini menegaskan pada ASN untuk senantiasa melaksanakan tugas di tahun 2024 dengan baik. "jadilah ASN yang bermotral, memiliki iptek dan im-tak sehingga bekerja, melayani masyarakat dengan baik. Jika di tahun 2023 ada kekeliruan mari kita ber-

tobat, dengan taubatan nasuha agar Allah SWT mengampuni dosa kita. Kemudian ditahun baru mari buka lembaran baru dengan catatan ke-baik. Karena setiap apa yang kita lakukan, suatu saat nanti kita harus dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah SWT," kata Pj. Bupati

Ustaz Muhammad Hamdani dalam ceramahnya menyampa-kan, bila kita ingin dimaafkan Allah SWT dan mendapat syafaat Rasulullah SAW maka kita sebagai manusia harus pandai bersyukur, bisa mengendalikan diri terhadap la-rangan Allah, tau hak orang lain, apa kewajiban kita, dan harus mengingat akan mati.

Ustaz memaparkan, taubat ada dua yg ha-

rus dilakukan oleh manusia yaitu : taubat kepada Allah dengan memohon ampunan atas dosa kepada Allah atas larangan agama yang pernah dilakukan. Taubat kedua meminta maaf kepada sesama manusia atas perlakuan kita kepadanya.

"Dan sebagai manusia yang dibekali akal, pikiran mari kita bina silaturahmi, agar terbina kerukunan hidup. Mari kita saling memaafkan atas kesalahan di masa lalu mari kita mulai lembaran baru di tahun baru 2024 dengan penuh keberkahan demi pembangunan Kabupaten Buton di masa datang.

Istigosah dan Doa bersama berlangsung kh-ikmad yang dipimpin langsung Ustaz Muhammad Hamdani, Shi. (*)

Pj. Bupati Buton La Ode Mustari Serahkan Penghargaan Guru Penggerak



Laporan: Andina L

BUTON, BP-Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi menyerahkan piagam penghargaan bagi guru penggerak serta bantuan laptop bagi program penggerak sekolah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Ruang VIP Bupati Buton, Pasarwajo, Senin 8 Januari 2024.

Dalam laporannya saat di wawa-

ncarai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Jufri Tandena, S.Kom.,M.Si mengatakan penyerahan bantuan laptop berjumlah 70 buah yang terbagi untuk SMP 50 buah dan SD 20 buah yang diserahkan khusus sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Buton.

“Penyerahan laptop ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya ma-

nesia sehingga dengan adanya laptop ini dapat membantu guru-guru sekolah penggerak dalam bekerja di era serba teknologi sekarang ini”, ucap Jufri.

Selain itu juga Pj. Bupati Buton memberikan penghargaan kepada guru penggerak yang telah berhasil menyelesaikan program guru penggerak provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Mei

s.d 23 Desember 2022 yang dilaksanakan melalui daring dan luring.

Ia juga mengatakan bahwa penyerahan piagam dan bantuan sebuah laptop ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Buton melalui dinas pendidikan kabupaten Buton kepada Guru maupun Kepala Sekolah Penggerak yang ada di Kabupaten Buton. (*)

Tingkatkan Kerja Sama Industri dengan SMK, BBPPMPV BMTI Selenggarakan Gebyar Karya Vokasi

CIMAHI- Kolaborasi menjadi pilar penting pendidikan vokasi. Dalam rangka merayakan hasil kolaborasi dan meningkatkan kerja sama antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan industri, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Industri (BBPPMPV BMTI) menyeleng-

garakan Gebyar Karya Vokasi BBPPMPV BMTI Tahun 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 26 - 28 Desember 2023 tersebut memiliki tema “Peningkatan Kerja Sama Vokasi” dan “BBPPMPV BMTI Awards”™. Gelar Karya Vokasi ini merupakan bagian dari presentasi hasil karya pelatihan yang dibuat un-

tuk mengembangkan edukasi, apresiasi, dan kolaborasi yang positif dari mitra BBPPMPV BMTI dalam meningkatkan kemampuannya dalam berkarya.

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Wardani Sugiyanto, turut membuka acara Gebyar Karya Vokasi BBPPMPV BMTI Tahun 2023. Dalam sambutannya, Wardani mengatakan bahwa pendidikan vokasi tidak akan

sukses tanpa adanya kolaborasi dengan industri. “Untuk itulah, kita menaruh harapan yang besar untuk penyelarasan pendidikan vokasi dengan industri,” ungkap Direktur Wardani dalam sambutannya di Balai Pancaniti, BBPPMPV BMTI, Cimahi, Jawa Barat, pada Rabu (27/12).

Wardani pun menekankan kepada industri agar

bersama-sama membangun pendidikan vokasi di Indonesia. Menurut Wardani, melalui kegiatan Gebyar Karya Vokasi menjadi langkah strategis yang sudah ditempuh BBPPMPV BMTI karena sudah memfasilitasi kerja sama antara industri dengan satuan pendidikan vokasi, khususnya SMK.

Mari kita optimalkan lagi kerja sama dengan industri. Kegiatan ini pun bisa menjadi refleksi untuk rencana dan meningkatkan capaian tahun depan,” tutur

Wardani.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BBPPMPV BMTI, Supriyono, dalam laporannya menyatakan bahwa BBPPMPV BMTI berkomitmen untuk memberikan fasilitas penyelarasan industri, baik melalui pelatihan program Upskilling dan Reskilling Guru Vokasi maupun bentuk kerja sama lainnya.

Terhitung sejak tahun 2023, terdapat 242 industri yang sudah melakukan kerja sama dengan BMTI dan SMK dengan melakukan

pemadanan industri. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 168, ungkap Supriyono.

Melalui laporannya tersebut, Supriyono pun menyampaikan bahwa momentum kolaborasi dengan industri perlu ditingkatkan kembali sehingga dapat berdampak lebih besar kepada pembelajaran di SMK. Kegiatan ini pun terdiri atas pameran hasil pembelajaran berbasis proyek atau project based learning (PBL) SMK dan industri, pameran PBL produk pelatihan dari BMTI, serta



Apresiasi untuk SMK dan Industri

Puncak acara kegiatan ini pun dimeriahkan dengan BBPPMPV BMTI Awards. BMTI Awards diberikan kepada para mitra BBPPMPV BMTI yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan semua program-program yang telah dicanangkan dan dilaksanakan di BBPPMPV BMTI.

Menurut Supriyono, BBPPMPV BMTI memandang penting untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dengan baik di sepanjang tahun 2023.

“BMTI Awards diberikan dalam beberapa kategori, yaitu Kategori Apresiasi bagi SMK, Kategori Apresiasi bagi Indus-

tri, dan Kategori Apresiasi bagi Program Keahlian,” terang Supriyono.

Salah satu industri yang berkontribusi besar terhadap pelatihan guru vokasi ialah PT Pindad, Bandung. PT Pindad berhasil meraih peringkat 1 sebagai industri dengan kontribusi terbanyak pada Program Pemagangan Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah.

Pada kesempatan tersebut, Senior Officer Pengelola Pembelajaran dan Sertifikasi PT Pindad, Muhammad Zulfikar, menyampaikan bahwa industri yang bergerak di manufaktur tersebut pun telah bekerja sama dengan BMTI sejak tahun 2019.

“Kami membantu dalam pelaksanaan pemagangan dan pelatihan guru serta kepala sekolah untuk bi-

dang teknik logistik, pengelasan, kelistrikan, dan pemesinan,” ungkap Zulfikar.

Di sisi lain, SMKN 1 Cimahi pun sukses meraih penghargaan sebagai SMK Pelaksana Cyber Vokasi Terbaik. Agus Priyatmono Nugroho selaku Kepala SMKN 1 Cimahi menjelaskan bahwa SMK yang dipercaya melaksanakan pelatihan cyber vokasi selama 2023.

“Pelatihan yang dilaksanakan di SMKN 1 Cimahi yaitu tentang internet of things (IoT) dengan berdampak pada puluhan guru dengan pembuatan alat pengendali secara otomatis,” ungkap Agus.

Selain dua kategori tersebut, BMTI pun memberikan penghargaan tambahan kepada industri dan SMK lainnya. (*)

Harian Pagi
Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post.

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky TA
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisma

Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan dan Pemasaran : Nabila D.A
Manager Iklan : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Rafael Alun Diberi Hukuman Tambahan Bayar Uang Pengganti Rp10 M



Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp10 miliar

Pewarta: Alwan

JAKARTA -- Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp10 miliar.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan Rafael terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatkan pidana tambahan kepada terdakwa sebesar Rp10.079.095.519," ujar ketua majelis hakim Suparman Nyompa saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Rafael Alun Divonis 14 Tahun Bui di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Uang itu mesti dibayarkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Apabila tidak dibayar, maka harta benda Rafael disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti. Dengan ketentuan jika Rafael tidak mempunyai harta

benda yang cukup, maka diganti pidana penjara selama tiga tahun.

Dalam kasus ini, Rafael dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menjatuhkan terhadap terdakwa Rafael Alun dengan pidana penjara 14 tahun, serta denda Rp500 juta, jika tidak dibayar diganti pidana tiga bulan," ujar Suparman Nyompa.

Hal memberatkan bagi Rafael pada kasus ini adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah yang giat memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara hal meringankan bagi Rafael, yakni terdakwa telah bekerja kepada negara sebagai pegawai negeri selama lebih 30 tahun, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Pihak terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir atas vonis hakim tersebut.

Vonis ini sedikit lebih ringan tuntutan jaksa KPK yang ingin Rafael dihukum dengan pidana 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan serta pidana uang pengganti Rp18,9 miliar subsider tiga tahun

penjara.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK, Rafael disebut bersama-sama dengan istrinya Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp16,6 miliar.

Penerimaan gratifikasi tersebut melalui PTARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo. Hal tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Rafael.

Selain gratifikasi, Rafael bersama-sama Ernie juga didakwa melakukan TPPU dalam periode 2003-2010 sebesar Rp5,1 miliar dan penerimaan lain sejumlah Rp31,7 miliar.

Lalu, periode 2011-2023 sebesar Rp11,5 miliar dan penerimaan lain berupa Sin\$2.098.365 dan US\$937.900 serta sejumlah Rp14,5 miliar.

Rafael menempatkan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan. Ia juga membeli sejumlah aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan roda dua dan empat, hingga perhiasan. (*)

Jaksa Penuntut Umum Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Haris-Fatia

Laporan: Hamid

JAKARTA -- Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Timur menempuh upaya hukum kasasi karena tidak terima atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur yang membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Sindiket Curanmor, Ratusan Kendaraan Dibawa dari Sidoarjo ke Jakarta



Ilustrasi. Ratusan kendaraan hasil curian yang digelapkan dibawa dari Sidoarjo ke Jakarta untuk diselidiki Polda Metro Jaya

Laporan: Hadi

JAKARTA -- Barang bukti kasus penggelapan kendaraan hasil curian yang melibatkan anggota TNI dipindahkan dari Sidoarjo, Jawa Timur ke Jakarta.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/ Brawijaya Kolonel Infantri Rendra Dwi Ardani mengatakan itu dilakukan karena kasus pidananya ditangani Polda Metro Jaya.

"Masyarakat yang mau konfirmasi kendaraannya yang hilang, apakah ada di dalam barbuk (barang bukti) yang

ditangkap tersebut dapat menghubungi Humas Polda Metro," ucap Rendra saat dikonfirmasi, Senin (8/1).Awal penanganan perkara ini bermula dari laporan polisi dari APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) dengan pelaku utamanya adalah EI (sipil) ke Polda Metro Jaya.

Atas dasar itu barang bukti berupa ratusan kendaraan hasil curian dibawa dari Sidoarjo ke Jakarta untuk diselidiki lebih lanjut oleh Polda Metro Jaya.

Pelaku diduga menjadikan Markas Gudbalkir Pusat

Zeni Angkatan Darat (Pusziad) di Buduran sebagai lokasi penampungan kendaraan curian.

Di lokasi tersebut disebut ditemukan 215 unit kendaraan roda dua dan 49 unit kendaraan roda empat. Dalam menjalankan aksinya, EI dibantu oleh Kopda AS.

"Yang mana saat ini saudara EI dalam proses penyidikan oleh Polda Metro [Jaya]" kata Rendra.

Seiring proses penyelidikan berjalan, ada dugaan keterlibatan tiga prajurit TNIAD. Kodam Brawijaya lantas ikut mengusut bersama

Polda Metro Jaya.

Tiga anggota TNI yang dimaksud sebenarnya bukan anggota Kodam Brawijaya. Namun, karena kasus pidana terjadi di Jawa Timur, maka Kodam Brawijaya yang menangani dugaan pelanggaran prajurit yang terlibat.

Rendra mengatakan tiga anggota TNI yang dimaksud kini masih diproses hukum oleh Pomdam V/Brawijaya.

Jika penyidikan selesai, kasus akan dilimpahkan ke Oditur Militer (Otmilti/Otmil) Surabaya untuk dilanjutkan ke proses sidang di Pengadilan Militer Surabaya. (*)

Haris dan Fatia merupakan terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur langsung menyatakan kasasi," ujar Plh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Herlangga menjelaskan langkah tersebut sesuai dengan Akta Permintaan Kasasi Nomor: 02/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Januari 2024 untuk

perkara Haris Azhar dan Akta Permintaan Kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 8 Januari 2024 untuk perkara Fatia Maulidiyanti.

Ia pun mengatakan pihaknya segera menyiapkan memori kasasi terhadap perkara tersebut.

Sebelumnya, Haris dan Fatia divonis bebas karena dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa dalam Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 14 ayat 2 jo Pasal 15

UU 1/1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut disertai dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Majelis hakim juga meminta harkat dan martabat kedua terdakwa dipulihkan seperti semula. Perkara itu diadili oleh ketua majelis hakim Cokorda Gede Arthana dengan hakim anggota Muhammad Djohan Arifin dan Agam Syarifet Baharudin.

Adapun JPU ingin Haris dan Fatia dihukum dengan pidana masing-masing 4 tahun penjara dan 3,5 tahun penjara.

Perkara yang disangkakan terhadap Haris dan Fatia ber-

mula dari sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris. Video itu berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!! >Nge-HAMtam'.

Mereka membahas kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya' yang menunjukkan ada keterlibatan Luhut.

Tak terima, Luhut lantas melaporkan Haris dan Fatia ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. (*)

Rabu, 10 Januari 2024

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi Terus Beri Perhatian Pada Atlet



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Di era kepemimpinan Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si sebagai Pj Wali Kota Baubau, perhatian terhadap atlet-atlet Kota Baubau begitu besar terutama yang telah membawa nama harum daerah seperti pada Porprov Sultra beberapa waktu lalu. Bahkan, belum lama ini telah menyerahkan bonus kepada atlet Kota Baubau yang berlaga di Porprov Sultra dan berhasil memberikan yang terbaik bagi daerah.

Saat membuka Kejuaraan Daerah (Kejurda) Karate Tingkat Sultra piala Kapores Cup Kedua yang diselenggarakan Inkanas di Lippo Plaza Baubau Rabu

Pj Wali Kota Baubau Reviu Kinerja Kepala OPD

Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Menjelang akhir tahun 2023 ini, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si melakukan reviu kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat lantai 2 kantor Wali Kota Baubau Palagimata Rabu (27/12/2023).

Didampingi Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos M.Si, Pj Wa-

lora (27/12/2023), Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si mengatakan, dalam beberapa bulan yang lalu, Pemkot Baubau memberikan penghargaan kepada atlet Kota Baubau yang berhasil meraih medali pada Porprov Sultra dan itu tidak main-main jumlahnya yakni total mencapai Rp 5 Milyar.

Dan tidak sampai disitu, pihaknya juga berjanji buat pengembangan atlet-atlet Kota Baubau akan terus memberikan perhatian serius seperti cabang atlet cabang olahraga Karate yang saat ini sedang menggelar Kejurda se Sultra di Baubau. Sebab disinilah bibit-bibit yang bisa didapatkan untuk mengharumkan nama negeri dan

likota mengungkapkan sejak awal kepala OPD sudah mempunyai perjanjian kinerja sehingga indikatornya akan mengacu ke perjanjian kinerja tersebut. "Bapak/ibu punya indikator kinerja saya akan mengacu kesitu. Jadi nanti kita akan buka, silahkan bapak/ibu nanti sampaikan laporan kinerja bapak/ibu seperti apa. Bagaimana kontribusi bapak/ibu untuk pemerintah daerah seperti apa. Karena

juga untuk membangun sportivitas. "Praktek sportivitas di olahraga sangat kental dan saya kira itulah yang menjadi contoh paling konkrit kenapa olahraga harus terus diberikan perhatian dan digelorkan," katanya.

Orang nomor satu di bumi khalifatul khamis ini memberikan apresiasi kepada Inkanas yang menyelenggarakan Kejurda Karate se Sulawesi Tenggara. Dan tentu diharapkan cabang-cabang olahraga yang lain apalagi dibawah Forki dan lain-lainnya dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan seperti ini untuk menggelorkan semangat olahraga terkhusus bela diri di Kota Baubau. (*)

kalau kinerja bapak/ibu kemana pemerintah daerah kemana itu bukan kinerja.Saya sudah baca laporan kinerja pemerintah daerah, saya sedang meminta Bappeda memberikan saya laporan kinerja triwulan sampai dengan triwulan ketiga,"ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini meminta menjelaskan SKP masing-masing karena itulah bentuk kinerja perorangan yang akan diukur. Dan

Asisten III Ingatkan OPD Kota Baubau Tentang Pelaporan Keuangan

BAUBAU, BP-Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si dalam kesempatan Apel Senin mengingatkan pelaporan keuangan. Apalagi untuk pelaporan hasil saat ini hampir setengah OPD belum melaporkan keuangan di bulan Januari 2024.

Menurut Darussalam, bila tidak dilaporkan untuk keuangan di bulan Januari 2024 maka nantinya akan mengakibatkan TPP yang tidak Terima oleh beberapa OPD. Apalagi, memang Perwali harus ada laporan keuangan untuk dapat dibayarkan TPPnya.

"Diharapkan kepada OPD secara penuh menyeter



La Ode Darussalam

laporannya dan hari ini Senin (8/1/2024) merupakan hari terakhir penerimaan laporan keuangan sehingga kalau tidak dipastikan OPD tidak menerima TPP di bulan Januari sekali lagi mohon perhatiannya untuk OPD,"ujarnya.

Darussalam menambahkan yang menjadi perhatian adalah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang sampai dengan saat ini masih juga ada sebagian OPD belum menginput datanya sebab ini dikhawatirkan nanti akan berakibat

temuan tidak menerima gaji untuk di bulan Januari 2024.

Apalagi, pada awal Februari itu BPK sudah masuk, sehingga kepada seluruh bendahara dan kepala OPD untuk memperhatikan SPJ di bulan Januari agar seluruh OPD untuk menyiapkan SPJ

Terkait dengan aplikasi absensi harian Pemkot Baubau Simalape, Darussalam memberikan apresiasi kepada Dinas Kominfo Kota Baubau yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki aplikasi ini. Kalaupun masih ada perubahan di aplikasi sebelumnya di maklumi saja sehingga kehadiran di awal jika ada keluhan langsung ke admin di Kominfo yang perlu bisa di perbaiki. (*)

Relawan PMI Jadi Inspirasi dan Teladan Kemanusiaan



Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si diwakili Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si saat kegiatan besar memperingati hari relawan PMI di pantai Lakeba Selasa (26/12/2023) mengatakan, relawan PMI tetaplh menjadi inspirasi dan teladan kemanusiaan bagi masyarakat, terus menjadi manfaat bagi sesama, pelopor dalam membangun kebersamaan perdamain dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat

SKP itu bukan ukurannya banyak dokumen tapi lebih banyak bicara soal DP3 yang lembar terakhir.

Sementara itu, terkait mengenai kegiatan dan serapan anggaran

yang lebih baik.

Menurut La Ode Darussalam, kerelawanan merupakan sebuah nilai universal. Suatu nilai kemanusiaan yang sederhana yaitu gotong royong, menolong orang atau sesama telah menjadi bagian dari budaya warisan bangsa Indonesia.

Disamping itu, relawan adalah jantung gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kurang lebih 155 tahun yang lalu, Henry Dunant menamakan visi tentang semangat kerelawanan yang terus hidup hingga kini bahkan

semakin kuat di dunia.

"Melalui Peringatan Hari Relawan kita mengapresiasi pengabdian yang tulus dan ikhlas dari para relawan yang telah memberikan pelayanan dan rasa nyaman kepada sesama dengan penuh dedikasi bahkan dalam situasi yang sulit terkadang membahayakan diri sendiri," ungkapnya.

Ditambahkannya, pembinaan relawan selama ini telah mengalami evolusi cukup signifikan dengan menghasilkan acuan manajemen pembinaan relawan dan mengembangkan

kapasitas relawan dengan berbagai kegiatan terpadu melalui program adaptasi pengurangan resiko bencana dan pembentukan karakter remaja.

Demikian pula dengan pembinaan relawan PMI di Kota Baubau yang perlu di apresiasi karena telah menjadi bagian penting masyarakat Kota Baubau dalam memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transfusi darah serta pelayanan kemanusiaan lainnya. (*)

salah belum tumbuh diatas 90%.

"Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita genjot lagi sama-sama sehingga kita bisa dapat diatas 90%. Nanti ukuran kerjaan itu berhasil anggaran

serapannya bagus, IKU bagus tidak ada masalah tapi kalau serapannya 100%, capaian programnya 100% tapi banyak temuan BPK itu itu belum selesai," tutupnya. (*)